

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

RADI JUANSYAH

01071002069

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

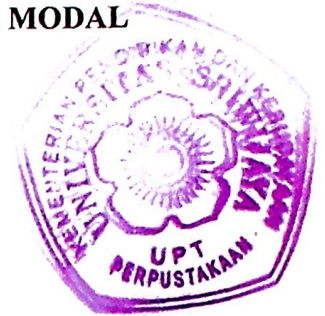
2013

R 21266
21730

S
352.407
Rad
P
C/1 → 132491
2013

C/1

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Skripsi Oleh :

RADI JUANSYAH

01071002069

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI**

2013

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Disusun oleh :

Nama : Radi Juansyah

Nim : 01071002069

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif


Tanggal persetujuan

Tanggal

26/7 2013

Dosen pembimbing

Ketua



Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D

NIP. 195212121981021001

Tanggal

Anggota



Yunisvita, S.E., M.Si

NIP. 197006292008012009

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Radi Juansyah
NIM : 01071002069
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 24 Oktober 2013 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 2 November 2013

Ketua,



Prof. H. Syamsurijal AK, Ph. D
NIP. 195401031983032001

Anggota,



Yunisvita, S.E M. Si
NIP. 197006292008012009

Anggota,



Dr. Azwardi, SE, M. Si
NIP. 196805181993031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP. 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Radi Juansyah
NIM : 01071002069
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian : Ekonomi Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :
“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan”

Pembimbing :

Ketua : Prof. H. Syansurijal AK, Ph. D
Anggota : Yunisvita, S.E., M. Si
Tanggal Ujian : 26 Oktober 2013

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, 4 November 2013
Pembuat Pernyataan,



Radi Juansyah
NIM. 01071002069

RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa : Radi Juansyah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juni 1990
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah (Orang tua) : Jalan Trans Sugihwaras No. 7
Desa Baru Rambang Kec. Rambang
Kab. Muara Enim
Alamat Email : radidee@yahoo.com

Pendidikan Formal :

- Sekolah Dasar : SDN 1 Baru Rambang
- SLTP : SMP Negeri 07 Prabumulih
- SMU : SMA Negeri 03 Prabumulih

Pendidikan Non Formal :-

Pengalaman Organisasi :

- 2008 – 2009 : Anggota Divisi KESKRETARIATAN HMJ
HIMEPA FE UNSRI
- 2009 – 2010 : Secretay of English Forum for Economic Students
(EFFECS) FE UNSRI
- 2010 – 2011 : Kepala Bidang Internal BEM FE UNSRI

Penghargaan Prestasi :-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia –Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan
3. Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan
4. Para Dosen Penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran
5. Orang tua

Inderalaya,

Penulis

ABSTRAK

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

Radi Juansyah; Prof. H. Syamsurijal AK, Ph. D dan Yunisvita S.E., M. Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data PAD, DAU, DBH dan belanja modal Provinsi Sumatera Selatan. Variabel yang digunakan adalah belanja modal sebagai variabel dependen, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebagai variabel independen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi belanja modal Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan secara individu variabel pendapatan asli daerah secara statistik signifikan terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Selatan, dana alokasi umum secara statistik signifikan terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Selatan, dana bagi hasil secara statistik signifikan terhadap belanja modal Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci: *Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL GOVERNMENT REVENUES, GENERAL FUND ALLOCATION AND REVENUES-SHARING ON THE CAPITAL EXPENDITURE IN SOUTH SUMATRA

By:

Radi Juansyah; Prof. H. Syamsurijal Ak, Ph.D.; Yunisvita, S.E., M.Si.

This study was aimed at finding out the influence of regional government revenues, general fund allocation, and revenues-sharing on the capital expenditure in South Sumatera. The secondary data namely regional government revenues, general allocation fund, revenues-sharing, and capital expenditure in South Sumatera. The capital expenditure was the dependent variable, and the regional government revenues, general fund allocation, and revenues-sharing were the independent variables. The panel data regression was used to analyze the data. It was found that all the independent variables affected the capital expenditure in South Sumatera. The regional government revenues had significant influence on the capital expenditure at this province. The general fund allocation had significant influence on the capital expenditure at the province. The revenues-sharing also had significant influence on the capital expenditure in South Sumatera.

Keywords: Capital Expenditure, Regional Government Revenues, General Fund Allocation, and Revenues-Sharing

Acknowledged by,



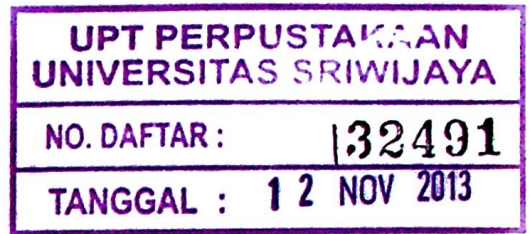
Hariswan P.J., M.Pd.

Email: hariswan@yahoo.com

Mobile Phone: 081368572001

Language Laboratory, Graduate School of Sriwijaya University

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes	12
2.1.2 Teori Makro Pengeluaran Pemerintah.....	14
2.1.3 Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah	15
2.1.4 Otonomi Daerah	15
2.1.5 Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah	17
2.1.6 Konsep Pendapatan Asli Daerah	20
2.1.7 Dana Perimbangan	22

2.1.8 Dana Alokasi Umum	24
2.1.9 Konsep Dana Bagi Hasil	26
2.1.9.1 Dana Bagi Hasil Pajak	27
2.1.9.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	27
2.1.10 Klasifikasi Belanja Daerah	28
a. Belanja Adminstrasi Umum	29
b. Belanja Operasi	30
c. Belanja Modal	31
d. Belanja Transfer	33
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Konseptual	36
2.4 Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	38
3.2 Rancangan Penelitian	38
3.3 Data dan Sumber Data	38
3.4 Teknik Analisis	39
3.4.1 Teknik Analisis Kualitatif	39
3.4.2 Teknik Analisis Kuantitatif	39
3.4.3 Pengujian Secara Statistik	42
3.4.4 Pengujian Secara Ekonometrika	44
3.4 Batasan Operasional Variabel	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Perkembangan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan	50
4.1.2 Perkembangan PAD Provinsi Sumatera Selatan	55
4.1.3 Perkembangan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Selatan	57

4.1.4 Perkembangan DAU di Provinsi Sumatera Selatan	59
4.1.5 Hasil Perhitungan Estimasi	61
4.1.5.1 Hasil Estimasi Panel Regression Model	61
4.1.5.2 Uji Asumsi Klasik	65
4.1.5.3 Hasil Uji Statistik	69
4.2 Pembahasan	72
4.2.1 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan	73
4.2.2 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan	74
4.2.3 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan	75
4.2.4 Analisis Kuantitatif Hasil Estimasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	81
Daftar Pustaka	82
Lampiran-Lampiran	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011	4
Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)	5
Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)	6
Tabel 1.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011	7
Tabel 3.1 Kesimpulan Hasil Pengujian <i>Durbi-Watson</i>	46
Tabel 4.1 Pertumbuhan Belanja di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2011 (dalam Juta Rupiah)	51
Tabel 4.2 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2011	53
Tabel 4.3 Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2011 (dalam juta rupiah)	56
Tabel 4.4 Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2011	58

Tabel 4.5 Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2011	60
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin Watson	63
Tabel 4.7 Hasil Uji Durbin Watson	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolinearitas Metode Korelasi Parsial	67
Tabel 4.9 Regresi Heterokedastisitas Menggunakan Metode Glejser	68
Tabel 7.1 Hasil Estimasi Model Regresi Berganda	85
Tabel 7.2 Hasil estimasi dengan menggunakan metode First Different dan Autoregressive	86
Tabel 7.3 Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	87
Tabel 7.4 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	88
Tabel 7.5 Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	89
Tabel 7.6 Dana Bagi Hasil Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	90

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 3.1 Kriteria pengujian Durbin-Watson	45
Gambar 4.1 Uji Normalitas	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Tabel 7.1 Hasil Estimasi Model Panel Regression	85
Lampiran 2 Tabel 7.2 Hasil estimasi dengan menggunakan metode First Different dan Autoregresive	86
Lampiran 3 Tabel 7.3 Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	87
Lampiran 4 Tabel 7.4 Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	88
Lampiran 5 Tabel 7.5 Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	89
Lampiran 6 Tabel 7.6 Dana Buagi Hasil Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (dalam juta rupiah)	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, maka pelaksanaan pembangunan menjadi hal yang sangat penting. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran yang merata disetiap daerah di Indonesia adalah dengan cara menerapkan sistem desentralisasi.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal daerah satu dengan daerah yang lain bisa jadi sangat beragam, perbedaan ini pada gilirannya dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula. Menurut Darwanto (2007) desentralisasi fiskal memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan membuktikan adanya hubungan positif dan signifikan.

Darwanto (2007) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap anggaran belanja modal. Dengan demikian bahwa desentralisasi memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk kepentingan layanan publik.



Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Otonomi merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini selaras dengan diberlakukannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penciptaan kemandirian daerah harus didukung oleh sumber pendanaan yang tepat pula. Penerimaan daerah yang tinggi merupakan salah satu syarat utama bagi daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan daerahnya. Penerimaan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan asli daerah, yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah, (2) Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bagi menurut jenis pendapatan, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah. Keterbatasan infrastruktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD

terhadap anggaran belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat?

Setiap daerah memiliki potensi dan kemampuan keuangan yang berbeda untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya, oleh karena itu untuk mengatasi masalah ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana perimbangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan adalah dana lokasi umum (DAU) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah setiap tahunnya sebagai dana pembangunan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap tahunnya ditentukan berdasarkan keputusan Presiden dan diatur dalam Peraturan Pemerintah dan setiap daerah otonom menerima besaran DAU yang tidak sama sesuai dengan kebutuhan fiskal pada daerah tersebut. Pada era desentralisasi ini fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Konsensuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Pemerintah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor (Simanjuntak, 2009).

Peningkatan pelayanan publik ini dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui perbaikan di berbagai sektor yang mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa. Pemerintah menganggarkan dana untuk pembelian aset

tetap untuk mendukung tugas pemerintahan maupun fasilitas publik dalam anggaran belanja modal tiap tahunnya. Adapun perkembangan belanja modal selama tahun penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Persentase Pertumbuhan Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011

Tahun	Jumlah (juta rupiah)	Pertumbuhan (%)
2005	269.510,63	-
2006	745.496,63	176,61
2007	984.279,76	32,03
2008	891.581,98	-9,41
2009	640.664,24	-28,14
2010	1.032.890,01	61,22
2011	1.139.120,15	10,28
Pertumbuhan Jangka Menengah		40,43

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan. Sumsel dalam angka berbagai edisi

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 perkembangan jumlah anggaran belanja modal yang mengalami penurunan yakni pada tahun 2008 dan 2009 sebesar -9,41% dan -28,14%. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan pada belanja rutin, sehingga mengurangi proporsi dari belanja modal. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan yang tajam pada belanja modal, karena pada tahun ini merupakan persiapan provinsi Sumatera Selatan untuk menyambut SEA Games 2011.

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah Pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang digunakan untuk melihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan

daerah secara utuh. Intinya, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri yang nantinya akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi Sumatera Selatan terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)

Sumber	Tahun		
	2009	2010	2011
Pajak daerah	895.326	1.226.713	1.671.519
Retribusi daerah	14.770	17.747	11.683
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	56.809	62.606	78.957
Lain-lain PAD yang Sah	87.425	62.870	86.962
PAD (Total)	1.054.332	1.369.936	1.849.120

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Selatan dalam angka berbagai edisi

Realisasi pendapatan daerah provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2009 hingga 2011 berdasarkan data perkembangan realisasi penerimaan daerah menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah (PAD) yang berasal dari sektor pajak daerah masih menjadi sumber yang paling besar, contohnya pada tahun 2011 saja 90,40% dari total PAD Sumatera Selatan berasal dari pajak

daerah, sedangkan penerimaan yang berasal dari lain-lain PAD yang sah pada 3 tahun terakhir menempati urutan kedua.

Besarnya PAD yang diperoleh provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2009 hingga 2011, menunjukkan adanya kenaikan penerimaan daerah. Hal ini cukup ideal dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2011 (dalam juta rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan Realisasi PAD (%)
2009	1.171.643	1.054.332	
2010	1.496.643	1.369.936	23,03
2011	1.563.703	1.849.120	25,91

Sumber : *www.djpk.depkeu.go.id*

Berdasarkan pada tabel 1.3, realisasi penerimaan daerah tahun 2009 dan 2010 belum terpenuhi, hal ini nampaknya memberikan hasil yang kontradiktif dengan semangat otonomi daerah yang semakin berkembang saat ini. Namun pada tahun 2011 penerimaan daerah melampaui target yang ditetapkan yaitu dari target sebesar 1.563.703 menjadi 1.849.120, hal ini menunjukkan kenaikan penerimaan yang signifikan dikarenakan pada tahun 2011 Provinsi Sumatera Selatan sedang menjadi tuan rumah SEA Games.

Dana yang diperlukan untuk membiayai pemerintahan tidak cukup jika hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari daerah tersebut maka diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi kesulitan pendanaan di daerah. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan Dana bagi hasil (DBH) yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan

merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (Wahyuni dan Adi, 2009).

Dana bagi hasil ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana bagi hasil dibagi menjadi 2 yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam jadi dana bagi hasil di berikan sesuai potensi pajak dan sumber daya alam yang ada daerah tersebut. Semakin besar potensi pajak dan sumber daya alam di daerah tersebut semakin besar pula DBH yang diterima. Adapun perkembangan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam selama tahun penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Perkembangan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011

Tahun	Dana Bagi Hasil	Pertumbuhan (%)
2005	544.111,75	
2006	702.874,23	29,17
2007	770.700,60	9,64
2008	878.797,55	14,02
2009	825.805,44	-6,03
2010	1.293.168,55	56,59
2011	1.313.456,69	1,56

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat perkembangan dana bagi hasil dari tahun 2005-2011 yang cenderung meningkat. Pada tahun 2006 DBH Provinsi Sumatera

Selatan terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 29,17% dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan sebesar 14,02%. Lain halnya yang terjadi pada tahun 2006 dimana DBH Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan yang tajam yaitu sebesar -6,03%, hal ini terjadi karena potensi pajak di provinsi Sumatera Selatan tiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Lain halnya dengan DBH pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat tinggi yaitu sebesar 56,59% dari tahun 2009. Hal ini dikarenakan pada tahun 2010 terjadi kelancaran arus distribusi barang sehingga terjadi peningkatan pada eksplorasi sumber daya alam di provinsi Sumatera Selatan.

Kaitannya dengan belanja modal, dana bagi hasil merupakan sumber dana untuk menambah proporsi belanja modal. Karena pemerintah cenderung mengalokasikan dana yang lebih besar untuk belanja rutin sehingga proporsi untuk belanja modal lebih sedikit. Masyarakat mengharapkan adanya peningkatan pelayanan diberbagai sektor publik dalam era disentralisasi fiskal. Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah yang nantinya akan merangsang kegiatan ekonomi di daerah dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel bebas yaitu PAD, DBH dan DAU karena ketiga variabel tersebut dianggap memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah pada tiap tahunnya khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Mengacu dari

uraian di atas maka penulis memberi judul penelitian ini “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Selatan*”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang menarik dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan dana bagi hasil, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan dana bagi hasil, dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan penelitian ini maka manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat ini diperuntukan bagi mahasiswa ekonomi pada umumnya dan mahasiswa ekonomi pembangunan pada khususnya, agar dapat menambah dan memperkaya bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam mendukung analisis pada penulisan skripsi ini.

2. Manfaat Operasional

Penelitian dan penulisan ini dilakukan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat menjadi rujukan dalam mengambil kebijakan untuk kemajuan ekonomi daerah.

1.5 Sistematika Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dalam penelitian, yaitu mengenai pengaruh belanja modal, belanja pegawai dan belanja

barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab berisi tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana yang dianalisis secara bersama-sama maupun secara parsial, pengukuran koefisien korelasi, pengukuran koefisien determinasi dan pengukuran koefisien regresi serta pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, saran untuk pengembangan bagi peneliti selanjutnya dan keterbatasan-keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Qazi & M. Anwar Jalil, 2010. "Revenue and Expenditure Nexus (A case of Romania)". *Volume 1, Issue 1. Romanian Journal of Fiscal Policy*.
- Asngari, Imam, 2007. *Modul Praktikum Ekonometrika Program EvIEWS dan SPSS*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. 2012. *Sumsel dalam angka berbagai edisi*. BPS. Palembang: BPS.
- Boediono. 1999. *Teori Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: LPFE.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2012. *Data Dana Bagi Hasil Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2011*. DJPKKKRI. Jakarta: www.djpk.depkeu.go.id/ diakses pada tanggal 12 februari 2012.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Magister Sains Ilmu-ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. SNA X, Makassar".
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Gujarati, Damodar N. dan Porter, Dawn C. 2009. *Dasar – dasar Ekonometrika Buku 1 dan 2*. Edisi 5. Jakarta: Penerbit Saleba Empat.
- Halim, Abdul, 2009. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah" (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali). *Jurnal Ekonomi STEI No.2/Tahun XIII/25*.
- Harahap, Alfn H, 2010. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara*. *Skripsi*, Medan: USU.
- HAW. Widjaja, 2004, *otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.

- Kamaluddin, Rustian. 1998. *Pengantar Ekonomi Pembangunan Edisi kedua*. LPFE UI, Jakarta.
- Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. *Tesis S2 UII*, Yogyakarta.
- Nurudeen, Abu & Abdullahi Usman, 2010. "Government and Economic Growth in Nigeria". *Volume 2010, BEJ -41. Business and Economics Journal. Nigeria*.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah Dan DIY)". *JAAI Volume 8 No. 2. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*.
- Saragih, Juli Panglima, 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setyowati, Lilis & Yoahana Kus Suparwati, 2012. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai variabel Intervening" (studi pada kabupaten/kota se Jawa Tengah). *Prestasi Vol. 9 No. 1. Semarang*.
- Simanjuntak, Gunawan, 2009. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi*. Medan : USU. (Dipublikasikan)
- Sumarni Saptianingsih, 2007. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I Yogyakarta". *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta. Volume 11 No. 3, Yogyakarta*.
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek*. Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Syahputra, Indra, 2010. Pengaruh PAD, DBH, DAU Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Utara. *Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan*. (Dipublikasikan)
- Syamsi, Ibnu, 1994. *Dasar - Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- S.Brittain, Len, 2002. "Finacing Capital Expenditures". *Cannadian Tax Journal. Vol. 50 No. 2. Canada*.

Wahyuni & Hari Priyo Adi. 2009. "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah" (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Bali). *Jurnal ekonomi*. Vol 2. No 7. Surabaya. (Dipublikasikan)

Wandira, Arbi Gugus. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal". *Accounting Analysis Journal*. Vol 1. No 3. Semarang, Indonesia.

Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

....., PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2005/55Tahun2005PP.HTM> di akses tanggal 11 Maret 2013.

....., PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
[http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Perintah/pp2005_58\(kelolaKeuDae\).pdf](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan%20Perintah/pp2005_58(kelolaKeuDae).pdf) di akses tanggal 18 Januari 2013.

....., UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
<http://www.djmbp.esdm.go.id/library/sijh/UU12Th1994PERUBAHAN%20U%20No12%20TA.pdf> di akses tanggal 13 Januari 2013.

....., UU No. 20 tahun 2000 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl349/parent/246> di akses tanggal 13 Januari 2013.

....., UU No. 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
<http://prokum.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf> di akses tanggal 26 Januari 2013.

....., UU No. 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi.
<http://prokum.esdm.go.id/uu/2003/uu-27-2003.pdf> di akses tanggal 13 Januari 2013.

....., UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
www.djlpe.esdm.go.id/.../files/.../UU%2032%20tahun%202004.pdf di akses tanggal 18 Januari 2013.

....., UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
www.djlpe.esdm.go.id/.../files/.../UU%2033%20tahun%202004.pdf di akses tanggal 13 Januari 2013.